

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, observasi dan analisis mengenai implementasi program bantuan pangan non-tunai (BPNT) melalui E-warong di Kecamatan Babakan Ciparay, peneliti menyimpulkan bahwa E-Warong memiliki peran yang penting dalam proses penyaluran program BPNT. Keberhasilan ini dianalisa menggunakan teori Van Meter dan Van Horn.

Hasil penelitian menemukan hal-hal yang mempengaruhi baik berupa dukungan atau hambatan terhadap proses pelaksanaan program BPNT melalui E-Warong, sebagai berikut

1. . *Standard and Objectives*

- Dalam menjalankan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), E-Warong dapat mengacu pada Pedoman Umum sebagai landasan dasar untuk mengetahui tugas dan kewajibannya. Dibentuknya E-Warong berupaya untuk memberikan kebebasan kepada KPM dalam menentukan bahan pangan sesuai dengan kebutuhannya, memberikan kebebasan KPM dalam menentukan waktu dan tempat, dan memberikan kualitas bahan pangan yang lebih baik.
- Berdasarkan hasil penelitian E-Warong tidak memberikan KPM dalam memegang kendali dalam menentukan bahan pangan. Dalam proses penyaluran E-Warong melakukan dengan cara memaketkan bahan

pangan. Ketika penyaluran berlangsung bahan pangan sudah dipaketkan dalam kantong plastik besar yang berisikan telur, ayam, gula, minyak, satu macam buah-buahan.

- Ketika proses penyaluran dilakukan, cara E-Warong memberikan bahan pangan kepada KPM menggunakan sistem pembagian secara serentak. Tidak memberikan kebebasan kepada KPM dalam menentukan waktu transaksi.
- Disisi lain, proses penyaluran yang dilimpahkan kepada E-Warong berdampak positif dalam hal penyediaan bahan pangan. Secara konsisten E-Warong mampu menyediakan bahan pangan dengan kualitas yang baik. Keahlian sebagai pedagang yang memiliki pengalaman, membuat bahan pangan yang disediakan selalu berkualitas
- Kendala dalam indikator ini, terdapat aturan yang tidak dilaksanakan dengan baik. Seperti tidak memberikan kebebasan dalam hal penentuan bahan pangan dan penentuan waktu kepada KPM. Sehingga berdampak pada timbulnya keresahan akan kualitas bahan pangan dan terjadi antrian panjang ketika proses penyaluran. Jika mengacu pada dasar hukum Program BPNT, tujuan dari dibentuknya E-Warong untuk menghilangkan kendala-kendala tersebut.

2. *Resources*

- Terdapat dua sumber daya yang menjadi fokus dalam penelitian yaitu teknologi dan informasi, dan manusia.

- Dalam memanfaatkan teknologi dan informasi pada proses penyaluran ini tujuannya untuk merealisasikan cita-cita dari manfaat dalam upaya meningkatkan KPM terhadap layanan keuangan formal dan perbankan. Sehingga menggunakan sistem E-Voucher yang berikutnya digunakan sebagai alat transaksi. Pada saat penyaluran berlangsung KPM membawa E-Voucher yang disebut kartu kombo, lalu melakukan transaksi melalui mesin EDC yang sudah disediakan.
- Mesin EDC yang dimiliki E-Warong sering mengalami error ketika proses penyaluran berlangsung. Berdasarkan temuan hal itu terjadi karena mesin tidak mampu melakukan transaksi dalam waktu singkat dengan skala yang banyak. Dan juga memungkinkan mesin EDC tidak didukung dengan kualitas yang baik.
- Selanjutnya mengenai sumber daya manusia. Dalam arti E-Warong sebagai objek nya. E-Warong memiliki tekad dan semangat untuk berkomitmen menjalankan program ini secara optimal. Faktor rasa empati kepada sesama warga sekitar membuat rasa ingin memberikan yang terbaik muncul.
- Kendala yang terjadi dalam indikator ini terkait mesin EDC yang dimiliki, perlu adanya pembaharuan terhadap mesin EDC tersebut. Karena ketika error terjadi berdampak pada KPM yang terhambat memperoleh bahan pangan. Apabila terjadi error dalam waktu yang lama, selain terhambat kualitas bahan pangan yang diperoleh KPM nantinya akan mengurangi kualitas dari bahan pangan.

3. *Interorganizational Communication and Enforcement Activities*

- Sebagai E-Warong komunikasi harus dijalankan dengan baik dengan aktor lainnya. E-Warong dengan Pihak Kecamatan, E-Warong dengan Pendamping BPNT, E-Warong dengan Bank Penyalur, dan E-Warong dengan pihak luar.
- Komunikasi E-Warong dengan Pihak Kecamatan khususnya Ibu Rani selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Babakan Ciparay berjalan dengan baik. Dilakukan secara formal maupun informal. Rapat selalu dilakukan dengan seluruh E-Warong untuk membahas permasalahan atau pembaharuan. Secara rutin dilakukan 3 bulan sekali, namun apabila ada keperluan mendesak selalu dirapatkan. Selain itu, dilakukan dengan cara lebih flexibel melalui Whatsapp atau tatap muka ketika waktu senggang.
- E-Warong dengan Pendamping BPNT, komunikasi berjalan baik. Peran pendamping sebagai solusi apabila terjadi kendala yang dialami E-Warong. E-Warong Margasuka dan Cirangrang pernah kesulitan dalam memperoleh pemasok yang mampu menyediakan bahan pangan dengan kuantitas yang banyak. Pendamping hadir membantu E-Warong untuk mencari pemasok yang mampu memberikan kebutuhan E-Warong
- E-Warong dengan Bank Penyalur, hal ini lebih mengurus hal teknis terkait mesin EDC yang digunakan. E-Warong menjalin komunikasi yang baik terkait pembahasan operasional mesin EDC. Apabila terjadi kendala pada mesin, langsung dikomunikasikan kepada pihak bank penyalur untuk segera diperbaiki

- E-Warong dengan pihak luar, seperti pemasok, dan lingkungan sekitar. E-Warong dengan pemasok menjalin hubungan sebagai rekan bisnis, karena E-Warong membutuhkan bahan pangan untuk disediakan. Hubungan keduanya berjalan baik karena saling membutuhkan.

4. *The Characteristics of The Implementing Agencies*

- Pada indikator ini dilihat dari karakteristik-karakteristik yang harus dimiliki oleh E-Warong diantaranya harus memiliki Kompetensi, Adanya pengawasan dalam subunit, Sumber daya politik, Vitalitas organisasi, Adanya komunikasi, Terjalin hubungan formal dan informal.
- Kompetensi yang dimiliki E-Warong cukup kompeten. Dari hasil penelitian seluruh E-Warong di Kecamatan Babakan Ciparay datang dari kemauan diri sendiri memutuskan menjadi E-Warong. mengikuti tahapan-tahapan uji kompetensi sebagai berikut memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas dan integritas di wilayah operasionalnya sesuai dengan kebijakan yang dimiliki oleh Bank Penyalur, sumber pendapatan utamanya dari kegiatan usaha yang sedang dijalani, menjual harga bahan pangan sesuai harga pasar, memiliki pemasok yang kompeten, mampu melayani KPM, bukan ASN/PSN, BUMN, atau BUMD. Seluruh E-Warong berhasil melewati tahapan itu sehingga mereka resmi menjadi E-Warong
- Dalam pelaksanaan program BPNT, antar aktor saling mengawasi dan mengontrol atas tindakan yang dilakukan. E-Warong sebagai posisi penting dalam penyaluran ini selalu diawasi oleh pihak kecamatan dan

pendamping atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Disisi lain, E-Warong pun mengawasi tindakan pihak kecamatan dan pendamping agar tidak melakukan hal diluar dari wewenang mereka

- E-Warong memiliki sumber daya politik sehingga tidak mudah dipengaruhi atau mempengaruhi terhadap suatu tindakan yang dapat mengancam atau menghambat keberlangsungan pelaksanaan program.
- Selalu berupaya mempertahankan, mengendalikan dan membangun E-Warong. dilakukan dengan cara memberikan layanan terbaik kepada KPM, menyediakan bahan pangan yang berkualitas, dan selalu responsive terhadap segala masalah yang terjadi.

5. *Economic, Social and Political Conditions*

- Dengan adanya E-Warong kondisi ekonomi berdampak positif. Pengakuan dari seluruh E-Warong, pendapatan menjadi meningkat. Hal itu menunjukkan bahwa pelaksanaan program BPNT terasa manfaatnya sesuai dengan tujuan yang berupaya meningkatkan penghasilan pedagang usaha mikro kecil dan menengah. Terlepas dari itu, meningkatkan penghasilan pada sektor pertanian, peternakan dan perkebunan. Hal itu terjadi akibat permintaan dari E-Warong yang tinggi.
- Kondisi sosial selalu sulit diprediksi, pihak eksternal tidak mudah dikendalikan. Secara kasat mata, menjadi E-Warong dapat menguntungkan bagi pengelolanya. Terjadi kegaduhan sosial dilingkungan masyarakat khususnya Kelurahan Sukahaji, Babakan, dan Babakan Ciparay, dimana non-E-Warong berusaha mempengaruhi

warga dengan memberikan berita palsu terkait reputasi dan kredibilitas dari E-Warong. sehingga muncul penurunan rasa kepercayaan. Hal itu, karena non-E-Warong ingin menjadi bagian dari E-Warong.

- Seluruh E-Warong memiliki sifat solidaritas yang tinggi, membuat tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan program. Tetap konsisten dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
- Kendala yang dialami yakni terjadinya kecemburuan sosial antara E-Warong dengan non-E-Warong. melihat dari segi keuntungan membuat non-E-Warong tertarik untuk dapat menjadi bagian dari E-Warong.

6. *The Disposition of Implementors*

- Aturan-aturan yang tercantum dalam Pedoman Umum, dipahami dengan baik oleh seluruh E-Warong. Sebelum diresmikan mereka mempelajari dahulu isi dari pedoman tersebut. Memahami tugas dan kewajibannya menjadi E-Warong. Setelah merasa bahwa dirinya mampu, lalu mereka menyatakan siap untuk menjadi E-Warong. Hal itu menunjukkan keseriusan dari seluruh E-Warong dalam melaksanakan program ini.
- Mampu tanggap terhadap segala persoalan yang dirasa mampu mempengaruhi pelaksanaan program. Menerima segala kritik dan saran baik dari KPM atau pihak kecamatan.
- Berani menerima atau menolak sesuatu demi keberlangsungan program. Menerima segala bentuk perintah, lalu berupaya

melaksanakan walaupun butuh waktu untuk adaptasi. Mampu menolak segala bentuk yang dapat mengancam keberlangsungan program. Contohnya, banyak pemasok menawarkan dengan harga murah dan berkualitas tetapi reputasinya belum terpercaya. Membuat E-Warong menolak penawaran darinya, karena dalam melaksanakan program ini bukan keuntungan yang dicari.

6.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non-Tunai melalui E-Warong di Kecamatan Babakan Ciparay maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Melakukan Evaluasi terhadap E-Warong setiap 3 bulan sekali dan diberlakukannya sistem surat peringatan. Evaluasi diberikan berdasarkan penilaian terhadap kinerja E-Warong perbulannya. Penilaian tersebut dilihat dari sejauhmana E-Warong menjalankan tugas dan kewajibannya. Apabila terjadi penyimpangan maka wajib diberikan surat peringatan yang pertama. Jika kesalahan dilakukan hingga ke tiga kalinya. Maka perlu diberikan tindakan tegas berupa pemberhentian menjadi E-Warong. Sehingga E-Warong terpacu untuk selalu melakukan tugas dan kewajibannya secara optimal.
2. Terkait fasilitas mesin EDC, nampaknya perlu ada pembaharuan. Dengan cara mengganti mesin EDC dengan kualitas yang lebih baik, yang dapat digunakan transaksi secara terus menerus dalam waktu

yang singkat. Atau dapat juga diberlakukannya pendampingan oleh Bank Penyalur setiap proses penyaluran Program BPNT dilaksanakan. Sehingga meminimalisir kerugian yang dialami KPM terkait waktu dan kualitas bahan pangan.

3. Kondisi sosial yang tidak kondusif jika dibiarkan begitu saja akan berdampak buruk bagi proses pelaksanaan program. Terkait kecemburuan sosial antara E-Warong dengan pedagang non E-Warong, penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan cara sistem kontrak dengan E-Warong. dapat diberlakukan 1 atau 2 tahun kontrak. Setelah itu, dibentuk E-Warong baru, untuk menggantikan posisi E-Warong sebelumnya. Sehingga manfaat dari Program BPNT melalui E-Warong ini dapat dirasakan oleh seluruh pedagang yang ada dilingkungan Kecamatan Babakan Ciparay.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrizal. (2017). *metode penelitian kualitatif: sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Birkland, T. A. (2010). *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concept, and Models of Public Policy making – 3rd ed*, (NY dan London: Routledge, 2010)
- Clarke, E. C. (2010). *American Public Policy: An Introduction. 6th ed* (NY: St. Martin's Press, 1999) dikutip dari T. A. Birkland, *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concept, and Models of Public Policy making – 3rd ed*. NY dan London: Routledge.
- Creswell, J. W. (2014). *research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran, edisi keempat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 250, terjemahan dari J. W. Creswell, *Research Design, Qualitative, Quantitative, and mixed Methods Approaches, Fourth Edition*. Sage Publication.
- Denzin, N dan Lincoln, Y. (1994). *qualitative research: second editionI*. London: Sage Publication.
- Dunn, W. N. (1994). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, edisi kedua*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), 22, terjemahan dari W. N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy - 14th ed*. USA: Pearson Education.
- Elmore, R. F. (2007). *Backward Mapping. Implementation Research and Policy Decisions*. (Political ScienceQuarterly, vol. 94, 1980), 601–616, dikutip dari dikutip dari F. Fischer, G. J. Miller, dan M. S. Sidney, *Handbook of Public Analysis: Theory, Politics, and Methods. United States*. London dan NY: Taylor & Francis group.
- Elmore, R. F. (2007). *Forward and Backward Mapping*. In K. Hanf and T.A.J. Toonen (eds), *Policy Implementation in Federal and Unitary Systems* (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1985), 33–70, dikutip dari dikutip dari F. Fischer, G. J. Miller, dan M. S. Sidney, *Handbook of Public Analysis: Theory, Politics, and Methods. United States*. London dan NY: Taylor & Francis group.
- Fischer, F. Miller, G. J. dan Sidney, M. S. (2007). *Handbook of Public Analysis: Theory, Politics, and Methods. United States*. London dan NY: Taylor & Francis group.

- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. NJ: Princeton University Press.
- Hill, M dan Hupe, P. (2002). *Implementing Public Policy*. London: Sage Publication.
- Lipsky, M. (2007). *Street-Level Bureaucracy. The Dilemmas of Individuals in the Public Service* (New York: Russell Sage Foundation, 1980), dikutip dari), dikutip dari F. Fischer, G. J. Miller, dan M. S. Sidney, *Handbook of Public Analysis: Theory, Politics, and Methods. United States*. London dan NY: Taylor & Francis group.
- Majone, G, dan Wildavsky, A. B. (2007). *Implementation as Evolution*. In H. Freeman (ed). *Policy Studies Review Annual*. (Beverly Hills: Sage Publication, 1978), 103–117, dikutip dari dikutip dari F. Fischer, G. J. Miller, dan M. S. Sidney, *Handbook of Public Analysis: Theory, Politics, and Methods. United States*. London dan NY: Taylor & Francis group.
- Miles, M. B, Huberman, M dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Third Edition*. USA: Sage Publication.
- Pressman, J. L. dan Wildavsky, A. (2007). *Implementation. How great expectations in Washington are dashed in Oakland; or why it's amazing that federal programs work at all. This being a saga of the Economic Development Administration as told by two sympathetic observers who seek to build morals on a foundation of ruined hopes* (Berkeley: University of California Press, 1973), dikutip dari F. Fischer, G. J. Miller, dan M. S. Sidney, *Handbook of Public Analysis: Theory, Politics, and Methods. United States*. London dan NY: Taylor & Francis group.
- Ripley, R. B. (1985). *Policy analysis in political science*. Chicago: Nelson Hall.
- Scharpf, F. W. (2007). *Games Real Actors Play. Actor Centered Institutionalism in Policy Research* (Boulder: Westview, 1997), dikutip dari dikutip dari F. Fischer, G. J. Miller, dan M. S. Sidney, *Handbook of Public Analysis: Theory, Politics, and Methods. United States*. London dan NY: Taylor & Francis group.
- Silalahi, U. (2015). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung, PT Refika Aditama.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suryabrata, S. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua (Jakarta: Bumi Aksara, 2001) dikutip dari LAN Republik Indonesia, *analisis kebijakan public*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

JURNAL

- Van Meter, D. S dan Van Horn, C. E. (1975). 'The Policy Implementation Process. A Conceptual Framework,' *Administration and Society*, 6 (1975): 462–474.
- Hjern, B. (1982). Implementation Research. *The Link Gone Missing* (Journal of Public Policy, Vol. 2, 1982), 301–308, dikutip dari dikutip dari F. Fischer, G. J. Miller, dan M. S. Sidney, *Handbook of Public Analysis: Theory, Politics, and Methods. United States* (London dan NY: Taylor & Francis group, 2007), 93.
- O'Toole Jr, L.J. (2004). 'The Theory-Practice Issue in Policy Implementation Research. Blackwell Publishing,' *Public Administration*, 82: 309-329.
- Sabatier, P. A. (1986). 'Top-Down and Bottom-Up approach to implementation research: a critical analysis and suggested synthesis,' *Journal of Public Policy*, 6: 21-48.

KEBIJAKAN PEMERINTAH

- Pedoman Umum Program Bantuan Pangan Non-Tunai
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

ARTIKEL BERITA

- Siaran Pers: The World Bank, 'Diperlukan Pendekatan Kebijakan Baru agar AsiaTimur dan Pasifik Mencapai Pertumbuhan Inklusif: Bank Dunia.'
<https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2017/12/04/new-policy-approach-needed-for-east-asia-and-pacific-to-achieve-inclusive-growth-world-bank>
- S. Admin Dinsos nangkis Kota Bandung, 'Evaluasi BPNT Kota Bandung.'
<http://dinsosnangkis.bandung.go.id/detail-berita/evaluasi-bpnt-kota-bandung>
- Open Data Kota Bandung, 'Data Kemiskinan Kota Bandung Berdasarkan Kecamatan.'
http://data.bandung.go.id/dataset/data-kemiskinan-kota-bandung-berdasarkan-kecamatan/resource/9fdb842-b652-43a2-8192-6d3e4c1f7603?inner_span=True